

Sosialisasi Sistem Informasi Sinkronisasi Data SIPD dan SIKD BKPD Kabupaten Bone Bolango

Alfian Zakaria^a, Eka Vickraien Dangkoa^b, Indhitya R. Padiku^c, Jemmy Pakaja^d,
Moh. Fitran Berahim^e, Nayla Yuniar Malapu^f

^{a,b,c,d} Program Studi Sistem Informasi, Universitas Negeri Gorontalo

alfian.zakaria@ung.ac.id^a, eka_dangkua@ung.ac.id^b, indypadiku@ung.ac.id^c, jemmy25@ung.ac.id^d, indmohamad11-

s1sisfo@mahasiswa.ung.ac.id^e, nayla_s1sisfo@mahasiswa.ung.ac.id^f

Abstract

The Regional Finance and Revenue Agency (BKPD) of Bone Bolango Regency plays a crucial role in managing regional finances and revenues. BKPD is responsible for the planning, implementation, and supervision of regional finances to ensure transparency and accountability in budget management. The regional revenue managed by BKPD is a key factor in formulating sustainable development policies. Therefore, a system is needed to help BKPD improve the efficiency and accuracy of regional financial management. This initiative is carried out to support the optimization of financial and revenue management systems through the development of digital-based technology, thereby (1) Enhancing transparency in financial reporting, (2) Automating the administrative process of regional revenue to be more effective, and (3) Facilitating financial data analysis as a basis for more accurate policy formulation.

Keywords: BKPD; Financial management; Regional revenue; Transparency; Accountability; Digital system.

Abstrak

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango merupakan instansi yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. BKPD bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pendapatan daerah yang dikelola BKPD menjadi faktor utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu BKPD dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah. Pengabdian ini dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pengembangan teknologi berbasis digital, sehingga dapat (1) Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, (2) Mengotomatiskan proses administrasi pendapatan daerah agar lebih efektif, dan (3) Mempermudah analisis data keuangan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih akurat.

Keywords: BKPD; Pengelolaan keuangan; Pendapatan daerah; Transparansi; Akuntabilitas; Sistem digital.

1. Pendahuluan

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah serta penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Landasan hukum yang menjadi acuan dari Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2024.

BKPD bertanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan fiskal serta anggaran daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, BKPD juga berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui

berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi, guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango.

Sebagai lembaga yang berperan dalam perencanaan anggaran dan alokasi dana untuk berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan daerah, BKPD dituntut untuk memiliki sistem informasi yang efisien dan akurat. Namun, hasil analisis di BKPD Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa sub bagian akuntansi masih menghadapi kendala dalam penggunaan sistem informasi yang memadai. Saat ini, sub bagian tersebut belum memiliki sistem yang mampu mensinkronisasikan data antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Akibatnya, proses pencatatan dan penginputan selisih data masih dilakukan secara manual, yang meningkatkan risiko kesalahan manusia, mengurangi efisiensi kerja, serta menurunkan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksesuaian data yang tidak terdeteksi dengan cepat dapat menghambat proses pelaporan dan audit keuangan, serta memperlambat validasi data. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang mampu mensinkronisasikan data antara SIPD dan SIKD secara otomatis menjadi solusi yang diperlukan guna mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di BKPD Kabupaten Bone Bolango.

2. Metode Pelaksanaan

2.1. Persiapan Magang

Pada tahap ini, pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan teknis yang diperlukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango. Tahap awal ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam proses bisnis yang berlangsung di BKPD. Melalui proses ini, tim pelaksana dapat mengidentifikasi tantangan serta kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengolahan data keuangan daerah.

Identifikasi ini mencakup sistem yang sudah berjalan, serta alat dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi proses pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, pengembangan solusi berbasis teknologi dapat dilakukan secara tepat guna meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem yang digunakan. Tahapan persiapan ini dapat ditinjau pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Tahapan persiapan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	TEMPAT
1	Pengumpulan data dan identifikasi masalah yang ada pada instansi	Mahasiswa	Kantor BKPD Kabupaten Bone Bolango
2	Analisis kebutuhan	Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan	Univeristas Negeri Gorontalo
3	Penyusunan desain sistem	Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan	Univeristas Negeri Gorontalo

2.2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi melibatkan mahasiswa program studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika UNG berdasarkan tugas masing-masing. Uraian kegiatan-kegiatan utama dalam pengabdian terlihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2 Tahapan Sosialisasi

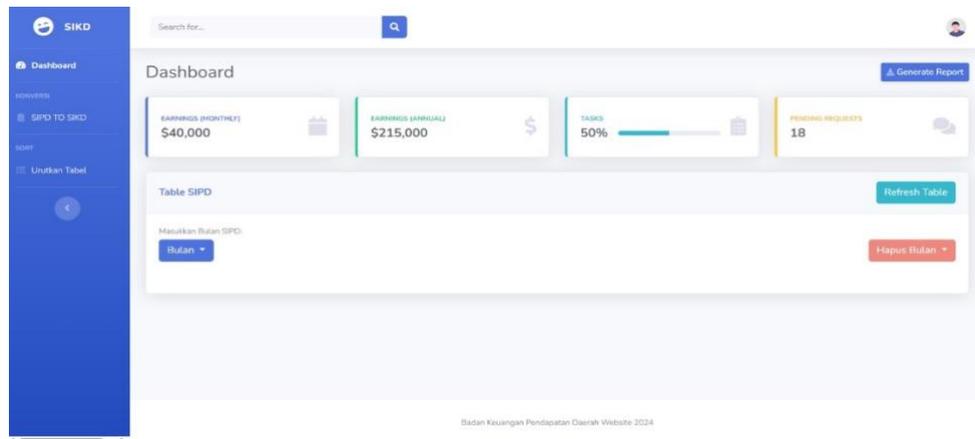
No	Uraian Pekerjaan	Program
1.	Persiapan materi dan sistem	Penyusunan bahan presentasi dan memastikan sistem telah berjalan sesuai dengan desain yang telah disepakati
2.	Uji Coba Sistem	Pengujian sistem dengan beberapa stakeholder utama dan dosen pembimbing lapangan
3.	Sosialisasi	Sosialisasi kepada seluruh pegawai BKPD Kabupaten Bone Bolango a. Penjelasan fungsi sistem b. Penjelasan cara penggunaan sistem
4.	Evaluasi	Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan sosialisasi dan sistem yang sudah dilaksanakan

3. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan sistem informasi sinkronisasi data SIPD dan SIKD di BKPD Kabupaten Bone Bolango bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan daerah. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah mengotomatisasikan proses sinkronisasi data antara SIPD dan SIKD, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan sistem ini, risiko kesalahan dalam pencatatan data dapat diminimalkan, efisiensi kerja meningkat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah lebih terjaga.

Sistem ini dirancang untuk membantu pegawai BKPD dalam mengintegrasikan data dari kedua sistem keuangan daerah secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini, proses validasi data yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dilakukan secara otomatis, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan up-to-date. Selain itu, sistem ini memungkinkan identifikasi perbedaan data secara langsung, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk menghindari ketidaksesuaian dalam laporan keuangan daerah. Berikut adalah tahapan dalam pengembangan sistem informasi sinkronisasi data SIPD dan SIKD di BKPD Kabupaten Bone Bolango:

- a) Tahap survey, merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem, di mana dilakukan survei awal terhadap proses bisnis di BKPD. Survei dilakukan secara langsung melalui observasi operasional dan diskusi dengan pegawai terkait guna memahami kendala yang dihadapi dalam sinkronisasi data SIPD dan SIKD.
- b) Tahap pengumpulan data, dikumpulkan melalui dua metode, yaitu pengumpulan data langsung dan tidak langsung. Pengumpulan data langsung dilakukan dengan wawancara serta observasi terhadap proses pencatatan dan penginputan data yang berlangsung di BKPD. Sementara itu, pengumpulan data tidak langsung dilakukan dengan meninjau dokumen laporan keuangan serta sistem yang digunakan sebelumnya untuk memahami alur kerja yang ada.
- c) Tahap perancangan sistem, berdasarkan hasil pengumpulan data, dilakukan perancangan sistem yang mencakup analisis kebutuhan pengguna, desain alur sistem, serta perancangan fitur utama yang akan diimplementasikan. Sistem ini dirancang agar dapat secara otomatis membaca, menyinkronkan, dan membandingkan data dari SIPD dan SIKD guna memastikan kesesuaian data.
- d) Tahap implementasi sistem, Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang kemudian dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.



Gambar 1. Sistem SIPD *to* SIKD

- e) Tahap sosialisasi sistem, Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan sosialisasi kepada pegawai BKPD Kabupaten Bone Bolango. Sosialisasi ini meliputi pengenalan sistem, alur kerja sistem, serta cara penggunaannya. Selain itu, dilakukan uji coba sistem untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam sinkronisasi data keuangan daerah.



Gambar 2. Sosialisasi Sistem

4. Kesimpulan

Pengembangan sistem informasi sinkronisasi data antara SIPD dan SIKD di BKPD Kabupaten Bone Bolango memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini mampu mengotomatisasikan proses sinkronisasi data yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan meningkatkan kecepatan validasi data.

Dengan adanya sistem ini, pegawai BKPD dapat lebih mudah mengidentifikasi perbedaan data serta melakukan koreksi secara cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga mendukung optimalisasi penyusunan laporan keuangan yang lebih terpercaya dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal.

Implementasi sistem informasi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Proses sosialisasi dan uji coba yang dilakukan memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara optimal oleh pegawai BKPD dalam mendukung operasional harian mereka.

Daftar Pustaka

LPPM UNG. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat*. Gorontalo: LPPM